

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	4
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	10
BAB III	11
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	11
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	11
Pendapatan - LRA	11
Belanja	11
Pendapatan - LO	12
Beban	12
Aset	15
Kewajiban	22
Ekuitas Dana	24
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	25
BAB IV	26
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	26
BAB V	28
PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari

- 1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
- 2 Neraca,
- 3 Laporan Operasional (LO),
- 4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan
- 5 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1 1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

1 2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah,
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17),

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25),
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 4),
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 16 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

1 3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, secara sistematis terdiri dari

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2021 melalui APBD Tahun Anggaran 2021 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 11.815.362.505 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 10.501.915.515 dan Belanja Modal sebesar Rp 1.313.446.990 yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp 9.393.406.590 dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini:

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
I	Belanja Operasi	10.501.915.515	8.103.910.590	2.398.004.925	77
II	Belanja Modal	1.313.446.990	1.289.496.000	23.950.990	98

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran DPPAPPKB Kabupaten Temanggung tahun 2021 total anggaran sejumlah Rp 10.501.915.515 terbagi menjadi 9 program dan 38 sub kegiatan. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan DPPAPPKB Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	%
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	12 943 920 00	12 876 240 00	99
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	28 974 400 00	28 515 450 00	98
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 300 000,00	9 282 150 00	100
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 400 000 00	7 476 100 00	80
5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 400 000 00	9 400 000 00	100
6	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	18 600 000 00	18 534 450 00	100
7	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	15 790 000,00	15 659 150 00	99
8	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	19 600 000 00	18 429 800 00	94

9	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 131 200 00	7 075 800 00	99
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3 151 673 646,00	3 091 315 435 00	98
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 880 000 00	1 877 000 00	100
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11 459 302 00	11 181 552 00	98
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 060 725 00	6 052 725 00	100
14	Fasilitas Kunjungan Tamu	6 548 374 00	6 490 360 00	99
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 442 800 00	7 324 520 00	98
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 677 588 00	3 726 448 00	43
17	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	39 100 000 00	29 654 682 00	76
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 400 000 00	9 085 000 00	97
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	441 401 750 00	424 329 604 00	96

20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 000 000,00	14 963 000,00	100
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37 600 000 00	35 534 000 00	95
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18 800 000 00	16 643 230 00	89
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9 400 000 00	9 294 750 00	99
24	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	31 739 000 00	29 015 110 00	91
25	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	38 288 000 00	37 996 700 00	99
26	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	33 960 000 00	31 066 080 00	91
27	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1 253 628 000 00	778 433 204,00	62
28	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	30 000 000,00	12 737 250 00	42

29	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1 387 200 000 00	1 386 300 000 00	100
30	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	67 177 000 00	41 775 000 00	62
31	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1 831 035 000 00	933 899 600 00	51
32	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	35 400 010 00	20 000 000 00	56
33	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	17 110 300 00	12 968 250,00	76
34	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	314 700 000,00	122 339 250,00	39
35	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	280 000 000 00	264 250 000 00	94
36	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8 536 000 00	8 347 600 00	98
37	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	9 298 500 00	9 174 100 00	99

38	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR, BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 268 260 000 00	620 894 750 00	49
JUMLAH		10 501 915 515 00	8 103 910 590 00	

Secara umum semua program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung dapat terlaksana

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain adanya refocusing anggaran dan pembatasan kegiatan (PPKM), sehingga kegiatan tidak dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3 1 Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3 1 1 Pendapatan - LRA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak memiliki pendapatan

3 1 2 Belanja

Jumlah Realisasi belanja selama tahun 2021 adalah sebesar Rp 9 393 406 590,00 dari anggaran sebesar Rp 11 815 362 505. Rekapitulasi Jumlah belanja dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut

No Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
5	BELANJA DAERAH	11 815 362 505	9 393 406 590	80
51	BELANJA OPERASI	10 501 915 515	8 103 910 590	77
5101	Belanja Pegawai	3 161 873 646	3 093 790 435	98
5102	Belanja barang dan Jasa	7 060 041 869	4 745 870 155	67
52	BELANJA MODAL	1 313 446 990	1 289 496 000	98
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	303 496 990	302 358 000	100
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1 009 950 000	987 138 000	98

3 1 3 Pendapatan - LO

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp 2 075 265 325

3 1 4 Beban

Beban diakui pada saat ini

- 1 Timbulnya kewajiban,
- 2 Terjadinya konsumsi aset,
- 3 Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Jumlah keseluruhan beban pada tahun 202 adalah sebagai berikut

Kode Rek	Nama Rekening	Jumlah
7	PENDAPATAN-LO	2 075 265 325
73	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	2 075 265 325
7301	Pendapatan Hibah-LO	2 075 265 325
	Jumlah Pendapatan	2 075 265 325
8	BEBAN DAERAH	9 018 710 051,84
81	BEBAN OPERASI	8 228 192 351,90
8101	Beban Pegawai	3 072 413 733,00
810101	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1 881 698 568,00
810102	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1 188 240 165,00
810103	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2 475 000,00
8102	Beban Barang dan Jasa	4 736 569 776,00
810201	Beban Barang	853 103 802,00
810202	Beban Jasa	2 487 296 554,00
810203	Beban Pemeliharaan	106 113 400,00
810204	Beban Perjalanan Dinas	844 969 020,00
810205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk	445 087 000,00

	Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	
8105	Beban Hibah	419 208 842,90
810505	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	419 208 842,90
82	Beban Penyusutan dan Amortisasi	790 517 699,94
8201	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	645 734 939,98
820102	Beban Penyusutan Alat Angkutan	264 878 228,48
820105	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	108 947 580,00
820106	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	174 047 400,00
820107	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	406 700,00
820108	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	326 375,00
820110	Beban Penyusutan Komputer	89 671 156,50
820115	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	7 457 500,0
8202	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	144 612 559,96
820201	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	134 674 382,96
820204	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	9 938 177,00
8203	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	170 200,00
820303	Beban Penyusutan Instalasi	157 700,00
820304	Beban Penyusutan Jaringan	12 500,00
	Jumlah Beban	9 018 710 051,84
	Surplus Defisit LO	(6 943 444 726,84

Beban Operasi

Jumlah Beban Operasi adalah sebesar Rp 9 018 710 051,84 yang merupakan penjumlahan beban pegawai dan beban barang/jasa

a Beban Pegawai

Beban pegawai pada 31 Desember 2021 merupakan hasil dari Belanja pegawai 2021 ditambah utang pegawai per 31 Desember 2021 dikurangi utang belanja 2020 dikurangi beban dibayar dimuka

Belanja Pegawai	=	Rp	3 093 790 435
Utang belanja pegawai 31 Desember 2021	=	Rp	91 315 000
Utang belanja pegawai 2020	=	Rp	143 001 702
Beban dibayar dimuka 31 Desember 2020	=	Rp	0

b Beban Barang dan Jasa

Beban barang jasa merupakan hasil dari perhitungan belanja barang jasa ditambah utang barang/jasa 2021 ditambah persediaan awal 2021 dikurangi persediaan per 31 Desember 2021 dan utang barang/jasa awal 2021

Belanja Barang/jasa	=	Rp	4 736 569 776,00
Utang belanja barang/jasa 2021	=	Rp	34 420 207
Persediaan awal	=	Rp	354 188 630,92
Beban barang modal menjadi persediaan	=	Rp	14 999 600
Persediaan per 31 Des 2021	=	Rp	763 ,398 964,70
Utang barang/jasa 2020	=	Rp	2 217 103

Surplus/Defisit dari operasi

Surplus/defisit dari kegiatan operasional yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Karena tidak ada pendapatan maka dalam hal ini defisit operasi adalah sebesar - Rp 6 943 444 726,84

3 1 5 Aset

Kode Rek	Nama Rekening	Awal	Akhir
1	ASET	8 224 575 851,77	9 081 406 085,61
11	ASET LANCAR	354 188 630,92	763 398 964,70
1101	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1112	Persediaan	354 188 630,92	763 398 964,70
111201	Barang Pakai Habis	354 188 630,92	763 398 964,70
13	ASET TETAP	7 870 387 220,85	8 318 007 120,91
1301	Tanah	272 850 000,00	272 850 000,00
130101	Tanah	272 850 000,00	272 850 000,00
1302	Peralatan dan Mesin	8 131 464 612,00	7 695 267 611,00
130201	Alat Besar	250 000,00	250 000,00
130202	Alat Angkutan	4 276 040 066,00	3 608 843 465,00
130205	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1 758 214 267,00	1 773 213 867,00
130206	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1 087 747 482,00	1 087 747 482,00
130207	Alat Kedokteran dan Kesehatan	9 615 300,00	9 615 300,00
130208	Alat Laboratorium	4 688 300,00	4 688 300,00
130210	Komputer	965 079 197,00	1 181 079 197,00
130215	Alat Keselamatan	29 830 000,00	29 830 000,00

	Kerja		
1303	Gedung dan Bangunan	6 714 612 498,00	7 746 643 498,00
130301	Bangunan Gedung	6 217 703 648,00	7 249 734 648,00
130304	Tugu Titik Kontrol/Pasti	496 908 850,00	496 908 850,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8 218 100,00	8 218 100,00
130403	Instalasi	6 308 000,00	6 308 000,00
130404	Jaringan	1 910 100,00	1 910 100,00
1305	Aset Tetap Lainnya	66 500,00	66 500,00
130501	Bahan Perpustakaan	66 500,00	66 500,00
1306	Konstruksi Dalam Pengerjaan	40 546 000,00	15 653 000,00
130601	Konstruksi Dalam Pengerjaan	40 546 000,00	15 653 000,00
1307	Akumulasi Penyusutan	(7 297 370 489,15)	(7 420 691 588,09)
130701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6 093 475 516,12)	(6 072 013 855,10)
130702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1 197 574 573,03)	(1 342 187 132,99)
130703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(6 320 400,00)	(6 490 600,00)
15	ASET LAINNYA	0,00	0,00
1503	Aset Tidak Berwujud	57 793 640,00	57 793 640,00
150301	Aset Tidak Berwujud	57 793 640,00	57 793 640,00
1504	Aset Lain-lain	15 050 730,00	0,00
150401	Aset Lain-lain	15 050 730,00	0,00
1505	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(57 793 640,00)	(57 793 640,00)

150501	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(57 793 640,00)	(57 793 640,00)
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(15 050 730,00)	0,00
150601	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(15 050 730,00)	0,00

A ASET

ASET LANCAR

Kode Rek	Nama Rekening	Awal	Akhir
1	ASET	8 224 575 851,77	9 081 406 085,61
11	ASET LANCAR	354 188 630,92	763 398 964,70
1101	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1112	Persediaan	354 188 630,92	763 398 964,70
111201	Barang Pakai Habis	354 188 630,92	763 398 964,70

1 Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas tersebut di atas adalah sisa UYHD (Uang Yang Harus Disetor) yang belum disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0 dan pajak yang belum disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0

2 Persediaan

Jumlah persediaan barang per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 763 398 964,70 dengan rincian sebagai berikut

Kode Rek	Nama Rekening	Awal
111201040001	Obat	514 170 614,00
111201040002	Obat-obatan Lainnya	247 976 850,70
111201030001	Alat Tulis Kantor	317 500,00
111201030002	Kertas dan Cover	739 000,00
111201030013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	195 000,00
	Jumlah	763 398 964,70

ASET TETAP

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2021 tersaji sebagai berikut

13	ASET TETAP	7 870 387 220,85	8 318 007 120,91
1301	Tanah	272 850 000,00	272 850 000,00
130101	Tanah	272 850 000,00	272 850 000,00
1302	Peralatan dan Mesin	8 131 464 612,00	7 695 267 611,00
130201	Alat Besar	250 000,00	250 000,00
130202	Alat Angkutan	4 276 040 066,00	3 608 843 465,00
130205	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1 758 214 267,00	1 773 213 867,00
130206	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1 087 747 482,00	1 087 747 482,00
130207	Alat Kedokteran dan Kesehatan	9 615 300,00	9 615 300,00
130208	Alat Laboratorium	4 688 300,00	4 688 300,00
130210	Komputer	965 079 197,00	1 181 079 197,00

130215	Alat Keselamatan Kerja	29 830 000,00	29 830 000,00
1303	Gedung dan Bangunan	6 714 612 498,00	7 746 643 498,00
130301	Bangunan Gedung	6 217 703 648,00	7 249 734 648,00
130304	Tugu Titik Kontrol/Pasti	496 908 850,00	496 908 850,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8 218 100,00	8 218 100,00
130403	Instalasi	6 308 000,00	6 308 000,00
130404	Jaringan	1 910 100,00	1 910 100,00
1305	Aset Tetap Lainnya	66 500,00	66 500,00
130501	Bahan Perpustakaan	66 500,00	66 500,00
1306	Konstruksi Dalam Pengerjaan	40 546 000,00	15 653 000,00
130601	Konstruksi Dalam Pengerjaan	40 546 000,00	15 653 000,00
1307	Akumulasi Penyusutan	(7 297 370 489,15)	(7 420 691 588,09)
130701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6 093 475 516,12)	(6 072 013 855,10)
130702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1 197 574 573,03)	(1 342 187 132,99)
130703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(6 320 400,00)	(6 490 600,00)

Ikhtisar mutasi selama Tahun 2021

Aset Tetap	Saldo 2020	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
Tanah	272 850 000	0	0	272 850 000
Peralatan & Mesin	8 131 464 612	495 517 999	931 715 000	7 695 267 611
Gedung & Bangunan	6 714 612 498	1 032 031 000	0	7 746 643 498
Jalan, Jaringan dan Irigasi	8 218 100	0	0	8 218 100
Aset Tetap Lainnya	66 500	0	0	66 500
Konstruksi dalam pengerjaan	40 546 000	0	24 893 000	15 653 000

Akumulasi Penyusutan	-7 297 370 489,15			-7 420 691 58,09
----------------------	-------------------	--	--	------------------

Total kenaikan nilai aset tahun 2021 sebesar Rp 1 527 548 999 yang menambah aset peralatan dan mesin berasal dari belanja alat kantor dan rumah tangga sejumlah Rp 495 517 999 serta Gedung dan bangunan sebesar Rp 1 032 031 000 dengan rincian sebagai berikut

Kode Rek	Klasifikasi Aset	Saldo Awal/2020	Tambah	Kurang	Saldo 31 Des 2021
1302	Peralatan dan Mesin	8 131 464 612,00	495 517 999	931 715 000	7 695 267 611,00
130201	Alat Besar	250 000 0	0 0		250 000
130202	Alat Angkutan	4 276 040 066 00	193 159 999	860 356 600	3 608 843 465 00
130205	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1 758 214 267 00	14 999 600	0	1 773 213 867
130205	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1 087 747 482,00	0 0		1 087 747 482
130207	Alat Kedokteran dan Kesehatan	9 615 300 00	0 0		9 615 300
130208	Alat Laboratorium	4 688 300 00	0 0		4 688 300
130210	Komputer	965 079 197 00	216 000 000	0	1 181 079 197

130215	Alat Keselamatan Kerja	29 830 000,00	0	0	29 830 000
1303	Gedung dan Bangunan	6 714 612 498,00	1 032 031 000	0	7 746 643 498 00
130301	Bangunan Gedung	6 217 703 648,00	1 032 031 000		7 249 734 648,00
130304	Tugu Titik Kontrol/Pasti	496 908 850 00	0	0	496 908 850,00
1304	Jalan, Jaringan dan Irigasi	8 218 100 00	0	0	8 218 100,00
130403	Instalasi	6 308 000 00	0	0	6 308 000 00
130404	Jaringan	1 910 100 00	0	0	1 910 100 00

ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah terdiri dari saldo aset tidak berwujud, aset lain-lain dan akumulasi penyusutan aset lainnya, dengan rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Akhir
5	ASET LAINNYA	0,00	0 00
1503	Aset Tidak Berwujud	57 793 640,00	57 793 640 00
150301	Aset Tidak Berwujud	57 793 640,00	57 793 640 00
1504	Aset Lain-lain	15 050 730,00	0,00
150401	Aset Lain-lain	15 050 730,00	0,00
1505	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak	(57 793 640,00)	(57 793 640,00)

	Berwujud		
150501	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(57 793 640,00)	(57 793 640,00)
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(15 050 730,00)	0 00
150601	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(15 050 730 00)	0,00
JUMLAH ASSET		8 224 575 851,77	9 081 406 085,61

3 1 6 Kewajiban

Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Hutang PFK (Hutang Pada Pihak Ketiga), Hutang Bunga dll.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Nilai kewajiban per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Akhir
2	KEWAJIBAN	145 218 805,00	125 735 207,00
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	145 218 805,00	125 735 207,00
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00

210105	Utang PPh Pusat	0,00	0,00
210106	Utang PPN Pusat	0,00	0 00
210109	Utang Pajak Daerah Katering	0,00	0,00
2106	Utang Belanja	145 218 805,00	125 735 207,00
210601	Utang Belanja Pegawai	143 001 702,00	91 315 000,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	2 217 103,00	34 420 207,00
JUMLAH KEWAJIBAN		145 218 805,00	125 735 207,0

Nilai kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp 125 735 207 terdiri dari utang PFK sebesar Rp 0 dan utang Belanja sebesar Rp 125 735 207

- Hutang PFK (Hutang Pada Pihak Ketiga)

Hutang PFK per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0

- Utang Belanja

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Akhir
2106	Utang Belanja	145 218 805,00	125 735 207,00
210601	Utang Belanja Pegawai	143 001 702 00	91 315 000 00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	2 217 103,00	34 420 207,00
JUMLAH KEWAJIBAN		145 218 805,00	125 735 207,0

Utang Belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp 125 735 207 terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp 91 315 000 dan Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 34 420 207

Utang Belanja Pegawai sebesar Rp 91 3015 000 merupakan utang Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember 2021 sedangkan Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 34 420 207 yang terdiri dari utang

belanja jasa kantor sebesar Rp 1 870 207 dan utang belanja honor Pegawai Tidak Tetap bulan Desember 2021 sebesar Rp 32 550 000

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2021 dapat diuraikan sebagai berikut

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
20601	Utang Belanja Pegawai	91 315 000,00
210601020001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	36 220 000 00
210601020009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	55 095 000,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	34 420 207,00
210602020017	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	25 150 000,00
210602020026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	7 400 000 00
210602020059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	76 620,00
210602020060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	143 400 00
210602020061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1 091 687,00
210602020063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	558 500,00

3 1 7 Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban/hutang pemerintah daerah Struktur dan Isi Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal, Ekuitas akhir, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, Koreksi-koreksi yang langsung

menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya

- koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya,
- perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Akhir
3	EKUITAS	8 079 357 046,77	8 955 670 878,61
31	EKUITAS	8 079 357 046,77	8 955 670 878,61
3101	Ekuitas	8 079 357 046,77	6 505 709 015,45
310101	Ekuitas	8 079 357 046,77	6 505 709 015,45
3103	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	0,00	9 393 406 590,00
310301	RK PPKD	0,00	9 393 406 590,00
	JUMLAH EKUITAS	8 079 357 046,77	8 955 670 878,61

- 3.2 Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

Setor Kas Daerah

Penyetoran sisa UYHD dilakukan sebelum akhir tahun anggaran dan setelah tahun anggaran berakhir

- Sisa UYHD sebesar Rp 129 525 181 yang berasal dari sisa GU disetorkan pada tanggal pada tanggal 29 Desember 2021

BAB III

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4 1 Data Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas tertentu dalam rangka mendukung tugas-tugas Pemerintah Daerah Dasar Hukum berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020, tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah dan Kabupaten Temanggung

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beralamat di Jalan Jendral Sudirman No 130

4 2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung terdiri dari

1) Kepala Dinas

2) Sekretaris

a Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

b Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 3) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a Kepala Seksi Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Perempuan
 - b Kepala Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
- 4) Kepala Bidang pengendalian Penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera
 - a Kepala Seksi Perencanaan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Penduduk
 - b Kepala Seksi Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera
- 5) Kepala Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana
 - a Kepala Seksi advokasi dan KIE Program KKBPK
 - b Kepala Seksi pelayanan Keluarga Berencana
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

4.3 Mutasi Pegawai

Pada tahun 2021 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung mengalami beberapa kali momen pergantian dan purna tugas pejabat struktural pada bulan Juli, Agustus Oktober, dan November 2021